



**Judul** : Jumlah petugas haji ditambah, komisi VIII harap jemaah makin aman  
**Tanggal** : Senin, 19 Januari 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

## Jumlah Petugas Haji Ditambah

# Komisi VIII Harap Jemaah Makin Aman

ANGGOTA Komisi VIII DPR Dini Rahmania mendukung penambahan personel dari unsur TNI/Polri untuk memperkuat perlindungan jemaah haji. Namun kebijakan itu diharapkan tidak mengurangi kuota bagi petugas haji lain. Sebab kuota petugas haji sudah diatur dalam regulasi penyelenggaraan haji.

"Tugas pokok dan fungsi TNI/Polri sebagai pelindung jemaah haji harus tetap dibedakan dari tugas pelayanan haji. Sehingga penempatannya perlu berada dalam skema tersendiri dan tidak menggerus alokasi petugas haji," jelas Dini.

Diketahui, kenaikan jumlah Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 2026 dari unsur TNI/Polri sebanyak 170 orang. Jumlah tersebut naik drastis dibanding tahun 2025 sebanyak 70 orang.

Dini menyambut baik langkah

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) yang menyiapkan personel tambahan dari unsur TNI/Polri. Hal itu diperlukan karena tantangan operasional yang besar dan kondisi layanan di Tanah Suci yang sangat dinamis, sehingga aspek perlindungan memang perlu diperkuat.

"Tak masalah jika jumlah penambahannya naik dua kali lipat. Selama penugasannya jelas sebagai pelindung jemaah dan penguatan keamanan," tandas politikus Nasdem ini.

Dia mengingatkan seluruh kebijakan ini harus bermuara pada satu hal. Yakni, memastikan perlindungan jemaah dilakukan secara maksimal. "Penguatan unsur TNI tidak menjadi persoalan sepanjang kuota petugas haji tetap dijaga dan fungsi perlindungan jemaah benar-benar dioptimalkan," ungkap legislator

asal daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur (Jatim) II ini.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Wahid menambahkan, seluruh petugas Haji tahun 2026 sudah mendapatkan pembekalan sebelum bertugas melayani jemaah. Pembekalan itu khususnya terkait peningkatan kualitas pelayanan, perlindungan jemaah, serta pemahaman teknis operasional selama berada di Tanah Suci.

Wahid menyebut, tujuan utama dari pembekalan dan pembinaan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap para petugas agar mampu memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan profesional. Dengan demikian, kualitas pelayanan haji secara keseluruhan dapat meningkat dan para petugas siap menghadapi berbagai perubahan dan tantangan di lapangan.

"Para petugas nantinya benar-

benar menyadari mereka merupakan salah satu elemen yang akan menjadi penentu sukses dan tidaknya ibadah haji tersebut," ujar politikus Gerindra ini.

Oleh karena itu, ia mengingatkan agar seluruh petugas tetap disiplin dan fokus pada tugas, dan tidak bekerja secara sembarangan. Petugas akan ditempatkan di berbagai lokasi, seperti di sekitar Masjidil Haram, Arafah, Muzdalifah, maupun Mina. "Identitas dan atribut petugas harus selalu dikenakan dengan jelas agar mudah dikenali oleh jemaah," imbau dia

Sementara, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan memastikan penambahan petugas haji tidak hanya berasal dari unsur TNI/Polri, tetapi juga mencakup tenaga kesehatan (nakes). Langkah tersebut dilakukan untuk

memperkuat layanan bagi jemaah, khususnya jemaah lanjut usia (lansia).

Gua Irfan mengatakan, penambahan petugas merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto agar pelayanan jemaah haji semakin optimal. "Tenaga kesehatan ditambah, tetapi yang lebih penting lagi adalah pemeriksaan kesehatan awal yang harus dilakukan lebih serius," ujar Gus Irfan di Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Tahun 2025, kata Gus Irfan, jumlah petugas haji dari unsur TNI/Polri hanya berkisar 70 orang. Tahun ini, jumlah tersebut ditingkatkan menjadi lebih dari 170 orang atau meningkat lebih dari 100 persen. Penambahan itu ditujukan untuk memastikan jemaah mendapatkan pelayanan terbaik selama menjalankan ibadah haji. ■ TIF